

Andika Wijaya
Wida Peace Ananta

DARURAT KEJAHATAN SEKSUAL



Penerbit

SINAR GRAFIKA

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 KONDISI DARURAT KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA	1
BAB 2 ANALISIS TERHADAP FENOMENA KEJAHATAN SEKSUAL	11
A. Seksualitas, Bagian Penting Peradaban.....	11
B. Penyalahgunaan Seksual	15
C. Teori Dominasi Patriarki (Feminisme)	18
D. Teori Psikoanalisis	21
E. Teori Kontrol	36
F. Teori Konflik	46
G. Teori Biologis	52
BAB 3 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	59
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	59
B. Sejarah Hukum tentang Hak Asasi Manusia.....	61
C. Perdebatan tentang Konsep Hak Asasi Manusia	65
D. <i>Derogable</i> dan <i>Non-Derogable Rights</i>	74
E. Kewajiban Asasi Manusia	75
F. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	77
G. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia	79
BAB 4 PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM KEJAHATAN SEKSUAL	80
A. Pengertian Anak	80
B. Hak-Hak Anak	85

C.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Seksual	89
D.	Peraturan yang Bersifat Represif Terkait Kejahatan Seksual terhadap Perempuan Dewasa	96
E.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	99
BAB 5	HUKUM PIDANAAN	106
A.	Konsep Efek Jera untuk Pelaku Kejahatan Seksual	106
B.	Pengertian Pidana	107
C.	Tujuan Pidana	110
D.	Konsep Pidana Berdasarkan Hukum Nasional	112
BAB 6	GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DAN GANTI KERUGIAN	119
A.	Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Ganti Kerugian sebagai Solusi Alternatif	119
B.	Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	122
C.	Ganti Kerugian	125
D.	Pertanggungjawaban Hukum dari Subjek Pelaku	127
E.	Pengajuan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Ganti Kerugian	131
BAB 7	ANALISIS TERHADAP PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016..	136
A.	Rancangan Perpu tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 (Kajian Historis Atas Perpu Nomor 1 Tahun 2016)	136
B.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua	139
C.	Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011	145
D.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	147
E.	Prosedur Pembentukan Perpu	151

F. Unsur Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Perpu	154
G. Perpu Harus Mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat	157
H. Alasan-Alasan yang Pro kepada Perpu.....	157
I. Alasan-Alasan yang Kontra terhadap Perpu	163
BAB 8 KOMENTAR ATAS PASAL-PASAL DALAM PERPU	
NOMOR 1 TAHUN 2016	181
A. Komentar atas Pasal 81	181
B. Komentar atas Pasal 81A	192
C. Komentar atas Pasal 82	194
D. Komentar atas Pasal 82A	201
DAFTAR PUSTAKA	203
PROFIL PENULIS	215